

LAPORAN KINERJA

2024

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

Jalan Perintis
Kemerdekaan 32

 (0351) 467327

kominfo@madiunkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun berjalan. Dokumen ini memuat capaian kinerja dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan layanan publik berbasis digital, serta pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan program serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan layanan komunikasi dan informatika yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang berkepentingan.

Madiun, 7 Maret 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**

NOOR AFLAH, S.Kom
Pembina Tingkat I

NIP. 19760907 200312 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan : Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik, dengan indikator Indeks Domain Layanan SPBE, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 4.82 (Nilai).
- b. Sasaran 1 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik, dengan indikator Tingkat Keterbukaan Informasi Publik, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 97.42 (Nilai).
- c. Sasaran 2 : Meningkatnya keamanan Informasi, dengan indikator Indeks Kemanan Informasi (KAMI), capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 625 (Nilai).
- d. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas data statistik sektoral, dengan indikator Tingkat Kematangan statistik sektoral, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 2,18 (Nilai).
- e. Sasaran 4 : Meingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 4,83 (Nilai).
- f. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan e-government, dengan indikator Persentase layanan e-gov yang sudah terintegasi, capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 71,79 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai ujung tombak

implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta pelayanan publik yang efektif dan efisien. Berikut beberapa tantangan yang umum dihadapi :

- a. Tantangan terkait infrastruktur teknologi meliputi keberlanjutan, skalabilitas, dan integrasi sistem yang kompleks. Penting untuk memiliki infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan dan perubahan serta dapat terintegrasi dengan berbagai pihak baik ekosistem bisnis maupun ekosistem pemerintahan.
- b. Keamanan data merupakan tantangan utama dalam menyelenggarakan layanan elektronik. Perlindungan data pribadi dan informasi sensitif harus menjadi prioritas utama. Serangan siber seperti peretasan, *malware*, dan serangan *phishing* dapat merusak integritas sistem dan mengancam kepercayaan pengguna.
- c. Tingkat literasi digital masyarakat maupun pegawai pengampu layanan. Ketidaksetaraan dalam tingkat keahlian penguasaan teknologi juga menjadi masalah, dan diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat maupun pegawai.
- d. Budaya Organisasi, Transformasi digital sering kali memerlukan perubahan budaya dalam organisasi. Resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman, dan ketidakpastian dapat menjadi hambatan. Penting untuk membangun budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Semua yang terlibat dalam kegiatan transformasi digital harus dapat berpikir dan memahami proses bisnis layanan secara digital.
- e. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan layanan elektronik juga tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Tantangan ini mencakup mengajak masyarakat untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi secara positif berdasarkan pengalaman masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan digital.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Struktur Organisasi.....	9
1.5 Permasalahan dan Isu Strategis	11
1.6 SDM Perangkat Daerah	11
1.7 Isu Gender Perangkat Daerah.....	12
1.8 Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis.....	15
2.2. Tujuan.....	17
2.3 Sasaran	17
2.4. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	20
1. Sasaran Meningkatnya Keterbukaan informasi Publik	21
2. Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi	26
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Data Statistik	32
4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	36
5. Sasaran meningkatnya Kualitas Penerapan e- Government	41
3.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	46
3.2 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	48
3.3 Hasil pelaksanaan gender pada perangkat daerah.....	49
3.4 Inovasi Perangkat Daerah	53

B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	60
A. Pohon Kinerja	
B. Matrik Renstra	
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (PAK)	
D. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024	
E. Penghargaan	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2024 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan komunikasi, informasi dan persandian di Kota Madiun serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (LKj) Kota Madiun tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran

dalam rangka mewujudkan tujuan yang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya;
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pengelolaan Pengelolaan Data dan Statistik; dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

1.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Berikut digambarkan mengenai identifikasi permasalahan yang ada terkait tugas dan fungsi pelayanan kedinasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai berikut :

1. Kurangnya Literasi Digital Masyarakat;
2. Tantangan dalam menangkal berita bohong dan misinformasi di ruang digital;
3. Sistem informasi antar Perangkat Daerah belum sepenuhnya terintegrasi;
4. Belum optimalnya sinkronisasi dan pertukaran data antar instansi;
5. Kurangnya Kesadaran akan Keamanan Informasi;
6. Risiko serangan siber terhadap sistem pemerintahan semakin tinggi.
7. Terbatasnya SDM yang kompeten.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Peningkatan keterbukaan informasi publik;
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan berkelanjutan;
3. Ketersediaan data statistik yang valid, relevan, dan mutakhir;
4. Peningkatan pengelolaan keamanan data dan informasi.

1.6 SDM Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada Tahun 2024, secara keseluruhan jumlah Personil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebanyak 103 Orang yang terdiri dari 32 orang ASN dan 71 Orang Non ASN sesuai tabel dibawah ini.

No.	Jabatan	Pendidikan Terakhir						
		PNS	PPPK	Non ASN	SMA	D1/D3	D4/S1	S2/S3
1	Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	1	-
2	Pejabat Eselon III	4	-	-	-	-	2	2
3	Pejabat Eselon IV	4	-	-	-	-	4	-
4	Pejabat Sub Koordinator	3	-	-	-	-	2	2

No.	Jabatan	Pendidikan Terakhir						
		PNS	PPPK	Non ASN	SMA	D1/D3	D4/S1	S2/S3
5	Fungsional Tertentu (JFT)	10	-	-	-	6	3	-
6	Pelaksana	10	-	71	30	19	30	1
JUMLAH		31	-	71	30	25	41	6

Tabel. 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun Tahun 2024

Selanjutnya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menurut jenis kelamin terdiri dari 76 Pegawai Laki-laki dan 27 pegawai perempuan.

1.7 Isu Gender Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan penting dalam mendukung transformasi digital, penyediaan layanan informasi publik, serta pengelolaan data pemerintahan yang berbasis teknologi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, muncul tantangan terkait kesetaraan gender yang perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan yang diberikan bersifat inklusif dan adil bagi semua pihak, termasuk perempuan dan kelompok rentan.

Salah satu isu utama adalah keterwakilan perempuan dalam jabatan teknis dan strategis. Sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sering kali didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses peluang kerja, pelatihan, dan promosi di bidang tersebut. Kesenjangan ini berdampak pada kurangnya perspektif gender dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan layanan berbasis digital.

Selain itu, akses terhadap teknologi dan layanan digital juga masih menjadi tantangan bagi perempuan. Tingkat literasi digital perempuan yang cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki memperbesar risiko ketidaksetaraan dalam pemanfaatan layanan pemerintah berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan keterampilan digital perempuan melalui pelatihan yang responsif gender.

Dari segi perlindungan keamanan informasi, perempuan lebih rentan terhadap berbagai bentuk ancaman di ruang digital seperti pelecehan daring dan pelanggaran privasi data pribadi. Untuk itu, Dinas perlu mengembangkan kebijakan dan infrastruktur keamanan informasi yang dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap kelompok yang rentan.

Pengelolaan data statistik berbasis gender juga menjadi tantangan tersendiri. Data yang terpilah berdasarkan gender sangat penting untuk memahami situasi sosial-ekonomi masyarakat dan merancang kebijakan yang inklusif. Oleh karena itu, Dinas perlu memastikan tersedianya data yang akurat dan terintegrasi dengan perspektif gender untuk mendukung perumusan kebijakan yang adil dan berimbang.

Melalui penguatan kebijakan dan program yang responsif gender, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong kesetaraan gender, memastikan inklusivitas layanan publik berbasis elektronik, serta menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi semua pengguna.

1.8 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024 menggunakan sistematika sebagai berikut :

- Kata Pengantar, Ringkasan Eksekutif, Daftar Isi
- BAB I Pendahuluan
Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi termasuk isu gender
- BAB II Perencanaan Kinerja
Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja perubahan tahun yang bersangkutan. Disampaikan keterkaitan sub tema/sub sub tematik Kota dengan sasaran OPD, tujuan, sasaran, dan pagu anggaran.

- BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

- BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

- Lampiran

DIS
KOM
INFO.
M A D I U N K O T A

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA tahun 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

2.1 Rencana Strategis

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus sejalan

dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Madiun.

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus mengacu pada visi misi dan program Walikota Madiun. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024. Visi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Sebagai mitra strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kota, Dinas Komunikasi dan Informatika memegang peranan kunci dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam mendukung berbagai sub tema strategi pembangunan, antara lain :

a. Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap transparansi dan efisiensi pelayanan diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dengan mudah dan cepat.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung hal tersebut diantaranya :

- 1) Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis mobile dan web.
- 2) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital untuk meningkatkan partisipasi publik.
- 3) Integrasi sistem informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

b. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi

Untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan berdaya saing, Dinas Kominfo terus mendorong keterbukaan informasi serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai elemen penting pembangunan kota.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung hal tersebut diantaranya :

- 1) Pengelolaan portal keterbukaan informasi publik yang transparan dan mudah diakses.
- 2) Sosialisasi literasi digital kepada masyarakat melalui seminar dan pelatihan.
- 3) Pengembangan layanan informasi berbasis aplikasi yang mempermudah masyarakat mengakses berita dan kebijakan kota.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah : “Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik”

Untuk mengetahui lebih jelas sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

2.3 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	93 Nilai

2	Meningkatnya Keamanan Infomasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	555 Nilai
3	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2.18 Nilai
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.65 Nilai
5	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68.5%

Tabel 2.1
Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024

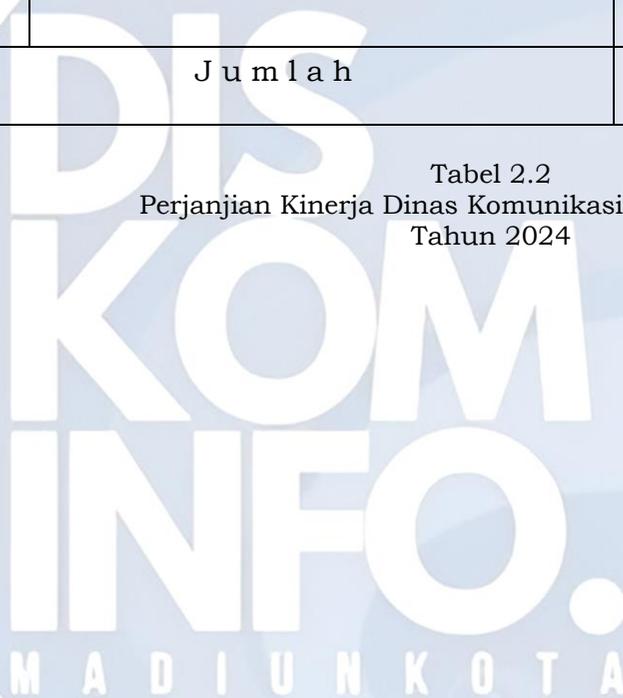
2.4 Perjanjian Kinerja

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	93 Nilai
2	Meningkatnya Keamanan Infomasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	555 Nilai
3	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2.18 Nilai
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.65 Nilai
5	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68.5%

No.	Program	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.948.661.563
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.421.850.097
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 16.874.395.275
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 100.000.000
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 241.752.000
J u m l a h		Rp. 28.586.658.935

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan dengan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	93 Nilai	97.42 Nilai	104.75%
2	Meningkatnya Keamanan Infomasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	555 Nilai	625 Nilai	112,61%
3	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2.18 Nilai	2.18 Nilai	100%
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.65 Nilai	4.83 Nilai	103.87%
5	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68.5%	71.79%	104.80%

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun memiliki 5 (lima) sasaran strategis yaitu Meningkatkan keterbukaan informasi publik, Meningkatkan Keamanan Infomasi, Meningkatkan kualitas data statistik sektoral, Meningkatkan kualitas penerapan e-government dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaa n Informasi Publik	93 Nilai	97.42 Nilai	104.75 %

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Target indikator Tingkat Keterbukaan Informasi Publik adalah 93 (Nilai), realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 97.42 (Nilai) kategori INFORMATIF. dengan capaian sebesar 104.75%.

Penilaian keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) secara rutin melaksanakan penilaian keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Badan Publik di wilayahnya. Tujuan utama dari Monev ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 3.1

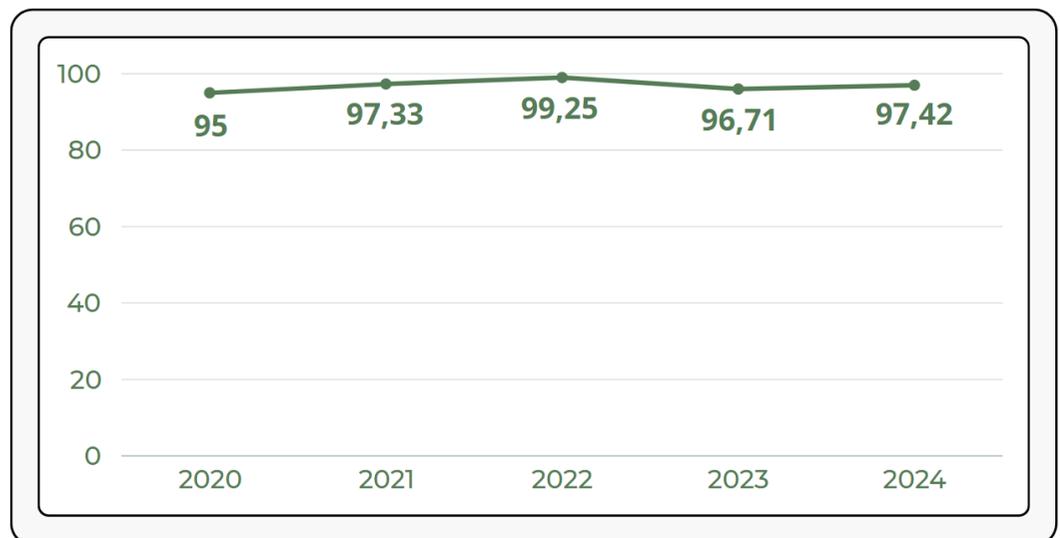
Hasil penilaian keterbukaan informasi publik Jawa Timur Tahun 2024

b. Perbandingan antara realisasi kinerja kinerja tahun ini dengan tahun Ialu dan beberapa tahun terakhir (5 tahun)

NO	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	95 Nilai	97,33 Nilai	99,25 Nilai	96.71 Nilai	97.42 Nilai

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik 5 Tahun Terakhir



Grafik 3.1
Capaian Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat keterbukaan informasi publik mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai yang dicapai adalah 95, kemudian meningkat menjadi 97,33 pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan pencapaian tertinggi sebesar 99,25. Namun, pada tahun 2023, nilai mengalami sedikit penurunan menjadi 96,71. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terdapat perbaikan dengan kenaikan nilai menjadi 97,42. Secara keseluruhan, tren keterbukaan informasi publik menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan awal periode, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2023.

Peningkatan dan fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah daerah, implementasi sistem keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik. Diharapkan ke depan, upaya peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi terus ditingkatkan untuk mencapai kualitas layanan publik yang lebih baik.

- c. *Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA)*

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target RENSTRA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	97.42 Nilai	93 Nilai

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik dengan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, indikator Tingkat Keterbukaan Informasi Publik telah diukur sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah sebesar 93 nilai. Namun, berdasarkan data realisasi tahun 2024, capaian tingkat keterbukaan informasi publik telah melampaui target, dengan nilai sebesar 97,42.

Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat, yang mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan dalam penyebaran serta aksesibilitas informasi publik. Pencapaian ini juga merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak dalam memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

- d. *Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional*

NO	Indikator	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
1	2	3	4	5
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75,65 Nilai	83,83 Nilai	97,42 Nilai

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat, dilakukan pengukuran tingkat keterbukaan informasi publik di berbagai tingkatan. Berdasarkan data yang tersedia, secara nasional, nilai keterbukaan informasi publik mencapai 75,65. Sementara itu, di tingkat Provinsi Jawa Timur, angka ini lebih tinggi, yakni 83,83.

Menariknya, Kota Madiun menunjukkan pencapaian yang luar biasa dengan nilai keterbukaan informasi publik sebesar 97,42, jauh melampaui rata-rata nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Madiun telah berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan yang efektif dalam memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu terbitnya Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
3. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun (PPID Utama) maupun PPID pada perangkat daerah (PPID Pembantu);

4. Monitoring dan Evaluasi PPID yang dilaksanakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi PPID Pembantu;
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi admin PPID Pembantu, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek;
4. Pelaksanaan PPID Award, sebagai pendorong agar pengelolaan PPID bisa dilaksanakan secara maksimal.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik;
2. Kendala yang dialami pada PPID Pembantu, diantaranya :
 - Terbatasnya SDM yang menangani PPID Pembantu;
 - SDM yang kurang handal dalam penulisan naskah berita dan pengelolaan sistem informasi.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID Pembantu; peningkatan kompetensi admin PPID Pembantu, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek; serta PPID Award;
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Keterbukaan Informasi
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Kesadaran Keterbukaan Informasi.

2. Sasaran Meningkatnya Keamanan Infomasi

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

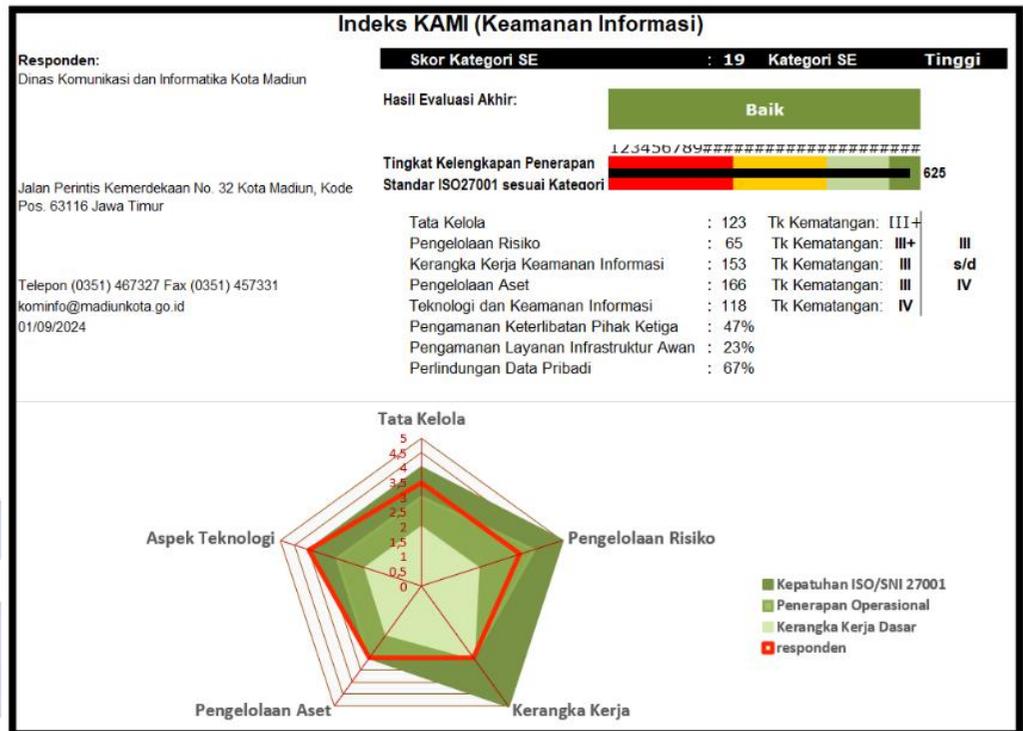
NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keamanan Infomasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	555 Nilai	625 Nilai	112,61%

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Keamanan Informasi Publik Tahun 2024

Target indikator Indeks Kemanan Informasi (KAMI) adalah 555 (Nilai), realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 625 (Nilai) dengan capaian 112,61%.

Pelaksanaan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan proses evaluasi yang dirancang untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan utama:

- 1) Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*): Organisasi melakukan evaluasi internal dengan mengisi kuesioner yang mencakup berbagai aspek keamanan informasi, seperti tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, dan teknologi. Tujuan dari penilaian mandiri ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi kesiapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan.
- 2) Verifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Setelah penilaian mandiri, BSSN melakukan verifikasi terhadap hasil tersebut. Proses verifikasi ini mencakup evaluasi aspek-aspek yang telah dinilai sebelumnya untuk memastikan akurasi dan validitas informasi yang diberikan oleh organisasi.

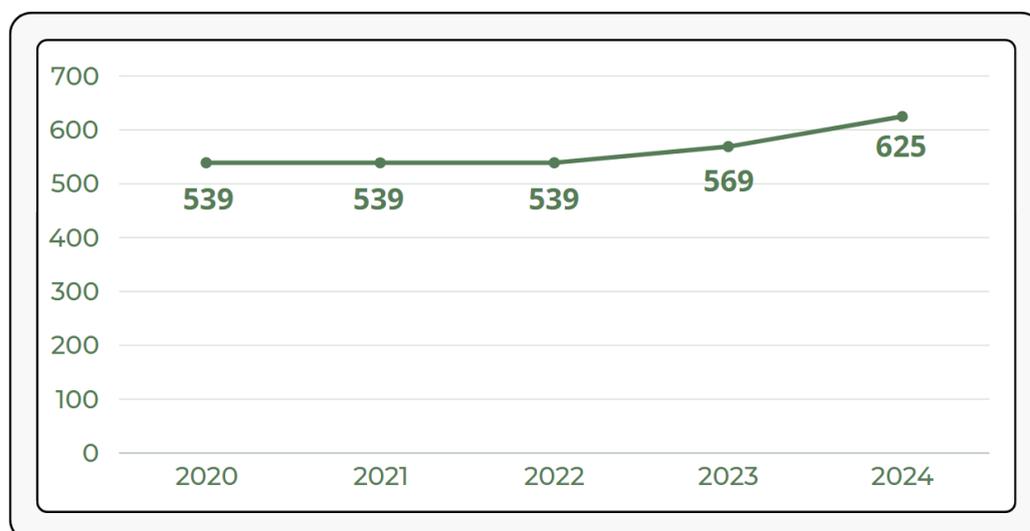


Gambar 3.1
Indeks KAMI Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024

b. Perbandingan antara realisasi kinerja kinerja tahun ini dengan tahun IaIu dan beberapa tahun terakhir (5 tahun)

NO	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	539 Nilai	539 Nilai	539 Nilai	569 Nilai	625 Nilai

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Keamanan Informasi Publik 5 Tahun Terakhir



Grafik 3.3
Capaian Kinerja Keamanan Informasi 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan data capaian kinerja, nilai Indeks KAMI mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020 hingga 2022, indeks ini bertahan di angka 539, yang menunjukkan adanya stabilitas dalam pengelolaan keamanan informasi. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan menjadi 569, menandakan adanya perbaikan dan peningkatan strategi keamanan informasi. Capaian ini terus meningkat pada tahun 2024, dengan nilai mencapai 625, yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan risiko keamanan informasi, perlindungan data, dan kesiapan sistem terhadap ancaman siber.

c. *Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA)*

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target RENSTRA
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Keamanan Infomasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	625 Nilai	N/A

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja indeks keamanan informasi dengan Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, seiring dengan dinamika isu strategis di Pemerintah Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyesuaian dokumen perencanaan. Salah satu

penyesuaian tersebut adalah perubahan indikator pada target RENSTRA, khususnya pada sasaran Meningkatkan Keamanan Informasi, dari semula “Persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian” menjadi “Indeks Keamanan Informasi”. Perubahan ini menyebabkan target RENSTRA pada tabel 3.9 di atas tidak terisi atau berbeda dengan target indikator kinerja tahun ini.

d. *Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional*

NO	Indikator	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
1	2	3	4	5
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A	611 Nilai	625 Nilai

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Berdasarkan data capaian tahun 2024, Kota Madiun memperoleh nilai 625, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 611.

Sementara itu, data tingkat nasional tidak tersedia (N/A), sehingga belum dapat dilakukan perbandingan langsung dengan standar nasional. Namun, capaian Kota Madiun yang melampaui rata-rata provinsi menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi penguatan keamanan informasi yang diterapkan telah berjalan dengan baik.

e. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan pelayanan persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya anggaran yang mendukung program dan kegiatan pelayanan persandian;

3. Melaksanakan sertifikasi ISO 27001, yang merupakan standar sistem manajemen untuk keamanan informasi yang diakui secara internasional.
4. Kerjasama dan koordinasi yang baik, dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, maupun dengan lembaga pusat seperti BSSN.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembaharuan sertifikasi ISO 27001 secara berkala;
2. Meningkatkan kerjasama dengan BSSN dalam implementasi sistem keamanan informasi.
3. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana, serta juknis penggunaan sarana dan prasarana Persandian yang belum optimal;
2. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang persandian dan keamanan informasi, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju, yang berefek semakin tinggi pula tingkat kualitas gangguan keamanan informasi.

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem keamanan informasi perangkat daerah; pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga dibidang persandian dan keamanan informasi, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin tentang keamanan informasi ke masyarakat dan perangkat daerah menindaklanjuti

perkembangan teknologi yang diiringi semakin beragam pula gangguan keamanan informasi.

2. Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber
3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesadaran Keamanan Siber
4. Penguatan Sistem Monitoring dan Audit Keamanan

3. Sasaran Meningkatnya kualitas data statistik sektoral

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2.18 Nilai	2.18 Nilai	100%

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tingkat Kematangan Data Statistik Sektoral
Tahun 2024

Target indikator Tingkat Kematangan statistik sektoral adalah 2,18 (Nilai), realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 2,18 (Nilai) dengan capaian 100%.

Pengukuran tingkat kematangan data statistik sektoral dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

Hasil penilaian Tingkat kematangan data statistik sektoral Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 :

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	1,68
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,14
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,67
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,18

Tabel 3.11
Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Madiun Tahun 2024

- b. *Perbandingan antara realisasi kinerja kinerja tahun ini dengan tahun Ialu dan beberapa tahun terakhir (5 tahun)*

NO	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat kematangan data statistik sektoral	N/A	N/A	N/A	2,88 Nilai	2.18 Nilai

Tabel 3.12
Capaian kinerja tingkat kematangan data statistik sektoral 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan capaian dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2020 hingga 2022, data tidak tersedia (N/A), dikarenakan penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik ini memang baru dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisis terhadap perkembangan di periode tersebut.

Pada tahun 2023, indikator ini mencapai 2,88, menandakan adanya peningkatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan capaian menjadi 2,18, menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas data statistik.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, atau kendala dalam integrasi dan validasi data lintas sektor. Untuk

meningkatkan kembali capaian ini, diperlukan upaya penguatan dalam tata kelola data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengelolaan data sektoral yang lebih baik.

- c. *Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA)*

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target RENSTRA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2.18 Nilai	N/A

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja tingkat kematangan data statistik sektoral dengan Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, seiring dengan dinamika isu strategis di Pemerintah Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyesuaian dokumen perencanaan. Salah satu penyesuaian tersebut adalah perubahan indikator pada target RENSTRA, khususnya pada sasaran Meningkatkan kualitas data statistik sektoral, dari semula “Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas” menjadi “Tingkat kematangan data statistik sektoral”. Perubahan ini menyebabkan target RENSTRA pada tabel 3.13 di atas tidak terisi atau tidak sesuai dengan target indikator kinerja tahun ini.

- d. *Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional*

NO	Indikator	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
1	2	3	4	5
1	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2,55 Nilai	3,08 Nilai	2,18 Nilai

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Tingkat Kematangan Data Statistik Sektoral mengukur kesiapan dan kualitas pengelolaan data dalam mendukung kebijakan

berbasis data. Berdasarkan capaian tahun 2024, Kota Madiun memperoleh nilai 2,18, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 2,55 dan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 3,08.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Madiun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan data statistik sektoral, seperti keterbatasan integrasi data, ketersediaan sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung. Untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral, diperlukan penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi antar instansi guna memastikan data yang lebih akurat, lengkap, dan dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu terbitnya Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun;
3. Monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan data sektoral Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi pengelolaan satu data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah:

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya data;
2. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral pada Perangkat Daerah;
3. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang statistik, disebabkan adanya moratorium aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian PAN-RB, termasuk untuk formasi tenaga ahli bidang Statistik.

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi data statistik sektoral; dan pelaksanaan pendampingan pada perangkat daerah.
2. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Data Statistik
3. Pengembangan Infrastruktur Teknologi untuk Statistik Sektoral
4. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Statistik
5. Peningkatan Kualitas dan Validitas Data Statistik Sektoral

4. Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.65 Nilai	4.83 Nilai	103.87 %

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Target indikator Indeks Pelayanan Publik adalah 4.65 (Nilai), realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah 4,83 (Nilai) dengan capaian 103.87%.

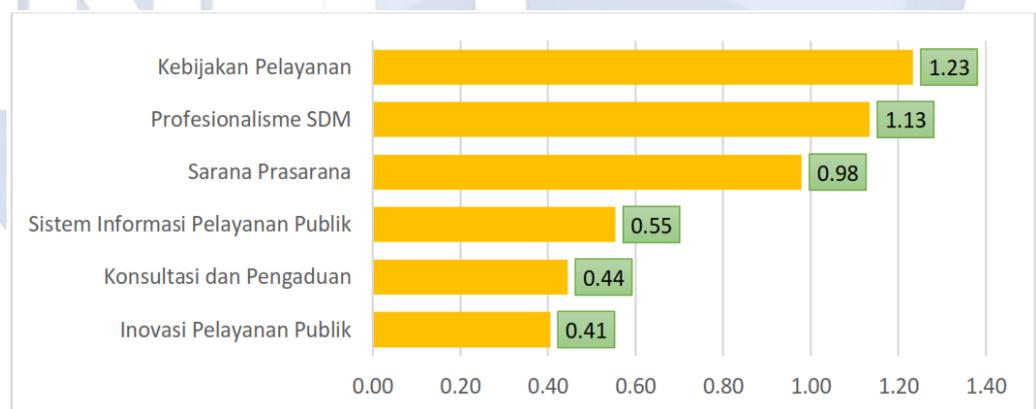
Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut.

1. Mendapat feedback/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/penerima layanan guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.
2. Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan.
3. Mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik masing-masing Unit Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

No	Aspek	Nilai
1.	Kebijakan Pelayanan	1,23
2.	Profesionalisme SDM	1,13
3.	Sarana Prasarana	0,98
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,55
5.	Konsultasi dan Pengaduan	0,44
6.	Inovasi Pelayanan Publik	0,41
INDEKS PELAYANAN PUBLIK		4,83
KATEGORI		A (Pelayanan Prima)

Tabel 3.16
Indeks pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024

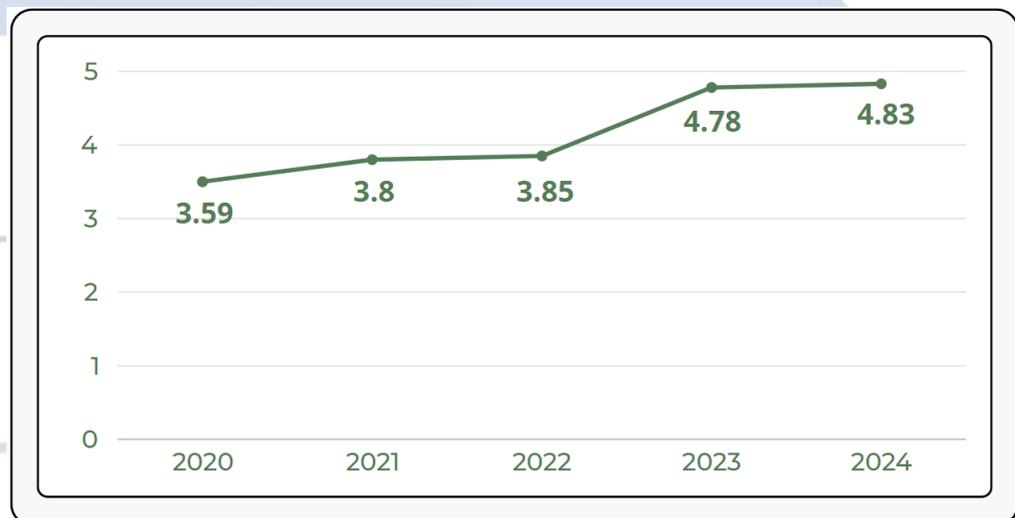


Grafik 3.4
Nilai IPP setiap aspek

b. Perbandingan antara realisasi kinerja kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (5 tahun)

NO	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pelayanan Publik	3,59	3,8	3,85	4,78	4,83

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik 5 Tahun Terakhir



Grafik 3.5
Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik 5 Tahun Terakhir

Pada tahun 2020, indeks pelayanan publik ini berada pada angka 3,59 dan terus meningkat setiap tahunnya, dengan kenaikan yang lebih signifikan pada tahun 2023 sebesar 4,78. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan indeks mencapai 4,83. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam berbagai aspek pelayanan publik, seperti peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Ke depan, perlu dilakukan penguatan sistem pelayanan berbasis digital dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan guna mempertahankan tren positif ini.

- c. *Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA)*

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target RENSTRA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.83 Nilai	N/A

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan Renstra Perangkat Daerah

Sama dengan beberapa indikator diatas, seiring dengan dinamika isu strategis di Pemerintah Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyesuaian dokumen perencanaan. Salah satu penyesuaian tersebut adalah perubahan indikator pada target RENSTRA, khususnya pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dari semula “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” menjadi “Indeks Pelayanan Publik”. Perubahan ini menyebabkan target RENSTRA pada table 3.18 di atas tidak terisi atau berbeda dengan target indikator kinerja tahun ini.

- d. *Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional*

NO	Indikator	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
1	3	4	5	6
1	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	4.83 Nilai

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, nilai indeks pada tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur tidak tersedia (N/A) dalam tabel ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penilai serta metode pengukuran yang digunakan di masing-masing tingkatan, sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai yang diperoleh Kota Madiun. Kota Madiun sendiri mencatat nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar

4.83, yang mencerminkan hasil evaluasi berdasarkan metode dan standar yang diterapkan di tingkat daerah.

- e. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi yang jelas terkait standar pelayanan publik dan kebijakan internal yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.
2. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi untuk mendukung pelayanan digital.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten.
4. Transparansi informasi melalui website resmi, media sosial, dan layanan PPID.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dan memperbarui SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi
2. Memastikan keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Mengembangkan portal layanan publik berbasis SPBE serta integrasi layanan digital dengan OPD lain untuk akses data yang lebih mudah.
4. Mengadakan pelatihan berkala bagi pegawai terkait teknologi informasi dan pelayanan publik
5. Mengoptimalkan website dan media sosial resmi sebagai kanal informasi yang transparan

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah :

1. Masih banyak masyarakat yang belum familiar dengan layanan digital yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Rencana tindak lanjut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2025 antara lain :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur digital di setiap unit layanan.
2. Mengadakan pelatihan intensif bagi pegawai terkait teknologi informasi dan pelayanan digital.
3. Mengembangkan program literasi digital bagi masyarakat melalui pelatihan langsung di komunitas.
4. Membangun sistem pemantauan kepuasan layanan berbasis data analitik.

5. Sasaran Meningkatnya kualitas penerapan e-government

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68.5%	71.79%	104.80 %

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Layanan e-Gov terintegrasi Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan e-government, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target persentase layanan e-government yang terintegrasi sebesar 68,5% pada tahun ini. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian mencapai 71,79%, yang berarti melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan pencapaian tersebut, tingkat keberhasilan program ini mencapai 104,80%. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam integrasi layanan e-government, yang diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan berbasis teknologi.

Penghitungan presentase layanan e-gov yang sudah terintegrasi menggunakan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{layanan aplikasi sudah terintegrasi}}{\text{layanan aplikasi yang bisa di-integrasi}} \times 100\%$$

Dari aplikasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun ada beberapa aplikasi yang bisa dan berpotensi untuk di integrasikan. Aplikasi yang berpotensi dapat di integrasikan adalah aplikasi tersebut harus memiliki API. API singkatan dari *Application Programming Interface*. API adalah sarana bagi website maupun aplikasi untuk bisa saling terhubung dan berkomunikasi. API adalah perantara komunikasi antara dua website atau aplikasi yang berbeda.

No	NAMA SUBDOMAIN	Integrasi	No	NAMA SUBDOMAIN	Integrasi
1	absensi.madiunkota.go.id	1	40	manpro.madiunkota.go.id	1
2	agenda.madiunkota.go.id	1	41	marketplace.madiunkota.go.id	1
3	aktifitas.madiunkota.go.id	1	42	matawarga.madiunkota.go.id	-
4	analisaberita.madiunkota.go.id	1	43	mcm.madiunkota.go.id	1
5	awaksigap.madiunkota.go.id	-	44	opendata.madiunkota.go.id	1
6	bakul.madiunkota.go.id	1	45	pecelpakkastan.madiunkota.go.id	1
7	bansos.madiunkota.go.id	1	46	peceltumpang.madiunkota.go.id	1
8	beasiswa.madiunkota.go.id	1	47	perizinan.madiunkota.go.id	1
9	bkpsdm.madiunkota.go.id tpp	-	48	ppdb.madiunkota.go.id	-
10	bookingprc.madiunkota.go.id	1	49	profitm-tech.madiunkota.go.id	1
11	buktidukung.madiunkota.go.id	1	50	proumkm.madiunkota.go.id	1
12	dashboard.madiunkota.go.id	1	51	puskesmas.madiunkota.go.id	1
13	data.madiunkota.go.id	1	52	rb.madiunkota.go.id	1
14	digiform.madiunkota.go.id	1	53	retribusi.madiunkota.go.id	-
15	edu.madiunkota.go.id	1	54	rsud.madiunkota.go.id	1
16	egratifikasi.madiunkota.go.id	-	55	ruangrapat.madiunkota.go.id	1
17	ekinerja.madiunkota.go.id	1	56	servicedesk.madiunkota.go.id	1
18	emonev.madiunkota.go.id	-	57	sicaker.madiunkota.go.id	1
19	eplanning.madiunkota.go.id	-	58	sigma.madiunkota.go.id	1
20	erapat.madiunkota.go.id	1	59	silandep.madiunkota.go.id	-
21	ereminder.madiunkota.go.id	1	60	silat.madiunkota.go.id	-
22	esakip.madiunkota.go.id	1	61	simda.madiunkota.go.id	-
23	esayur.madiunkota.go.id	1	62	simjab.madiunkota.go.id	1
24	e-sppt.madiunkota.go.id	1	63	simonev.madiunkota.go.id	-
25	esurat.madiunkota.go.id	1	64	simpadama.madiunkota.go.id	-
26	esurprais.madiunkota.go.id	1	65	simpeg.madiunkota.go.id	1
27	etask.madiunkota.go.id	1	66	siopa.madiunkota.go.id	1
28	evjab.madiunkota.go.id	1	67	sipandu.madiunkota.go.id	-
29	ewaris.madiunkota.go.id	1	68	sipdok.madiunkota.go.id	1
30	gis.madiunkota.go.id	-	69	sipkd.madiunkota.go.id	1
31	investasi.madiunkota.go.id	1	70	sitebas.madiunkota.go.id	-
32	jdih.madiunkota.go.id	-	71	skp.madiunkota.go.id	1
33	kak.madiunkota.go.id	1	72	spip.madiunkota.go.id	-

34	kmk.madiunkota.go.id	1	73	tpb.madiunkota.go.id	1
35	lensa.madiunkota.go.id	-	74	ujikir.madiunkota.go.id	-
36	lp.madiunkota.go.id	1	75	verval.madiunkota.go.id	1
37	lppd.madiunkota.go.id	-	76	wbs.madiunkota.go.id	1
38	lpse.madiunkota.go.id	-	77	evakip.madiunkota.go.id	1
39	manekin.madiunkota.go.id	1	78	mcm.madiunkota.go.id/	1
JUMLAH					56

Tabel 3.21
Aplikasi yang bisa di integrasikan

Presentase layanan e-gov yang sudah terintegrasi menggunakan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{layanan aplikasi sudah terintegrasi}}{\text{layanan aplikasi yang bisa di-integrasi}} \times 100\%$$

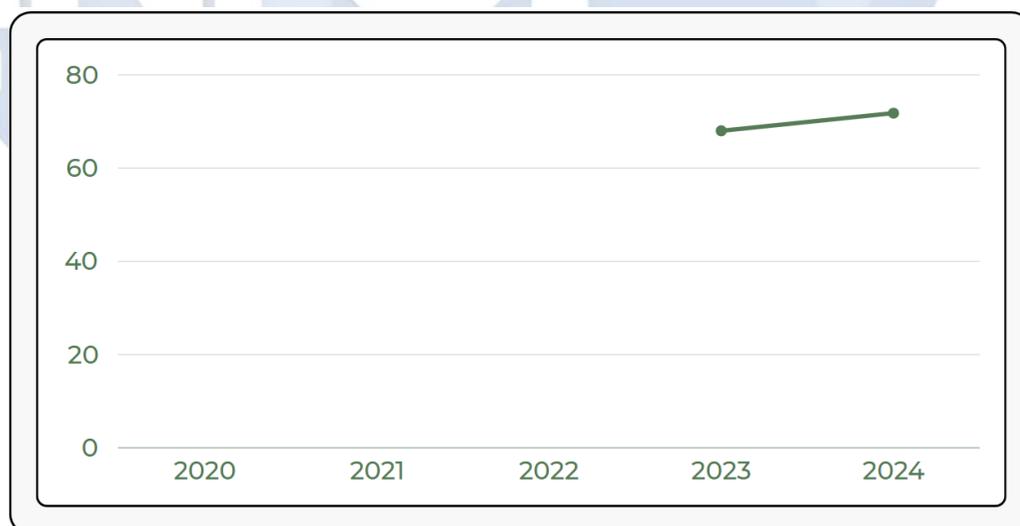
$$: \frac{56}{78} \times 100\%$$

$$: 71.79\%$$

b. Perbandingan antara realisasi kinerja kinerja tahun ini dengan tahun IaIu dan beberapa tahun terakhir (5 tahun)

NO	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	3	5	6	7	8	
1	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	N/A	N/A	N/A	68%	71.79 %

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Layanan e-Gov terintegrasi 5 (lima) Tahun Terakhir



Grafik 3.6
Capaian Kinerja Layanan e-Gov terintegrasi 5 Tahun Terakhir

Indikator Persentase layanan e-government yang sudah terintegrasi mulai digunakan pada tahun 2023. Oleh karena itu, data capaian kinerja untuk tahun-tahun sebelumnya (2020, 2021, dan 2022) tidak tersedia (N/A) karena indikator ini belum diterapkan pada periode tersebut. Pada tahun 2023, capaian indikator ini mencapai 68%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 71,79%. Peningkatan ini mencerminkan adanya progres dalam upaya integrasi layanan e-government untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

- c. *Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RENSTRA)*

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target RENSTRA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	71.79%	N/A

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja Layanan e-Gov terintegrasi dengan Renstra Perangkat Daerah

Sama dengan beberapa indikator diatas, seiring dengan dinamika isu strategis di Pemerintah Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyesuaian dokumen perencanaan. Salah satu penyesuaian tersebut adalah perubahan indikator pada target RENSTRA, khususnya pada sasaran Meningkatkan kualitas penerapan e-government, dari semula “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo” menjadi “Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi”. Perubahan ini menyebabkan target RENSTRA pada tabel 3.23 di atas tidak terisi atau berbeda dengan target indikator kinerja tahun ini.

d. *Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional*

NO	Indikator	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
1	3	4	5	6
1	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	N/A	N/A	71.79%

Tabel 3.24

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Indikator Persentase layanan e-government yang sudah terintegrasi menunjukkan capaian Kota Madiun sebesar 71,79%. Sementara itu, data untuk tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur tidak tersedia (N/A) karena indikator ini belum digunakan atau belum ada standar pengukuran yang seragam di level tersebut.

e. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan *e-government*, antara lain regulasi/ aturan mengenai kerahasiaan informasi, tanda tangan digital, cyber security, serta arsitektur teknologi informasi dalam rangka integrasi;
2. Adanya dukungan dan komitmen kuat dari pimpinan;
3. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan *e-government*;
4. Kemajuan Teknologi Informasi, dalam implementasi *e-government* antara lain tingkat kebutuhan teknologi/aplikasi, infrastruktur jaringan, interoperabilitas, standarisasi, serta kemampuan SDM.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2. Optimalisasi Digitalisasi Layanan Publik
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Digital
4. Integrasi dan Kolaborasi Antar Instansi
5. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dibidang TIK

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan *e-Government* di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah :

1. Terbatasnya anggaran untuk pengembangan e-Gov
2. Belum terintegrasinya semua data antar instansi pemerintahan

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan *e-Government* tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota Madiun; peningkatan kompetensi tenaga teknologi informasi, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek.
2. Melaksanakan upaya peningkatan integrasi sistem informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

3.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2024, anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp 28.586.658.935,00 dengan realisasi mencapai Rp 28.143.950.950,00 atau serapan anggaran Tahun 2024 adalah 98,45%.

Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, sesuai dengan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024, dengan rincian belanja langsung per capaian Kinerja dan Program sebagai berikut :



Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5x7	10=9-8
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.65 Nilai	4.83 Nilai	103.87%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.948.661.563	7.560.326.934	8.256.274.765,49	695.947.831,49
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	93 Nilai	97.42 Nilai	104.75%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.421.850.097	3.408.476.409	3.584.387.976,61	175.911.567,61
Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68.5%	71.79%	104.80%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	16.874.395.275	16.841.637.293	17.684.366.248,20	842.728.955,20
Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2.18 Nilai	2.18 Nilai	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.000.000	98.591.315	100.000.000,00	1.408.685,00
Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	555 Nilai	625 Nilai	112,61%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	241.752.000	234.918.999	272.236.927,20	37.317.928,20
TOTAL						28.586.658.935,00	28.143.950.950,00	29.897.265.917,50	1.753.314.967,50

Tabel 3.25
Tingkat Efisiensi Anggaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja

Dari table diatas dengan perhitungan efisiensi adalah Total ((Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran)/total alokasi anggaran, maka diperoleh nilai efisiensi : $\frac{1.753.314.967,50}{28.586.658.935,00} \times 100\% = 6,2\%$.

Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat penghematan anggaran sebesar 6,2% dari total alokasi yang telah disediakan, menunjukkan tingkat efisiensi dalam realisasi anggaran yang dilakukan.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebanyak 31 (tiga puluh dua) orang ASN dan 75 (tujuh puluh) Tenaga Non ASN. Dari jumlah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Pemerintah Kota Madiun.

3.2 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melaksanakan 5 (lima) Program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah dari kegiatan ini adalah adanya

- Kerjasama yang baik, antar pegawai serta didukung tersedianya anggaran dalam mendukung tercapainya target kinerja strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
- Terlaksananya kegiatan-kegiatan PPID Utama dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan persentase keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah.

- Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, yang mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel
- Koordinasi yang baik, baik antar perangkat daerah sebagai produsen data, maupun koordinasi yang baik dengan instansi pusat dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).
- Telah dilaksanakannya ISO 27001 secara berkala

3.3 Hasil pelaksanaan gender pada perangkat daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun berkomitmen dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai program dan kegiatan. Sebagai instansi yang berperan dalam pengelolaan informasi dan teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta memastikan akses yang setara terhadap layanan informasi dan komunikasi bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang gender.

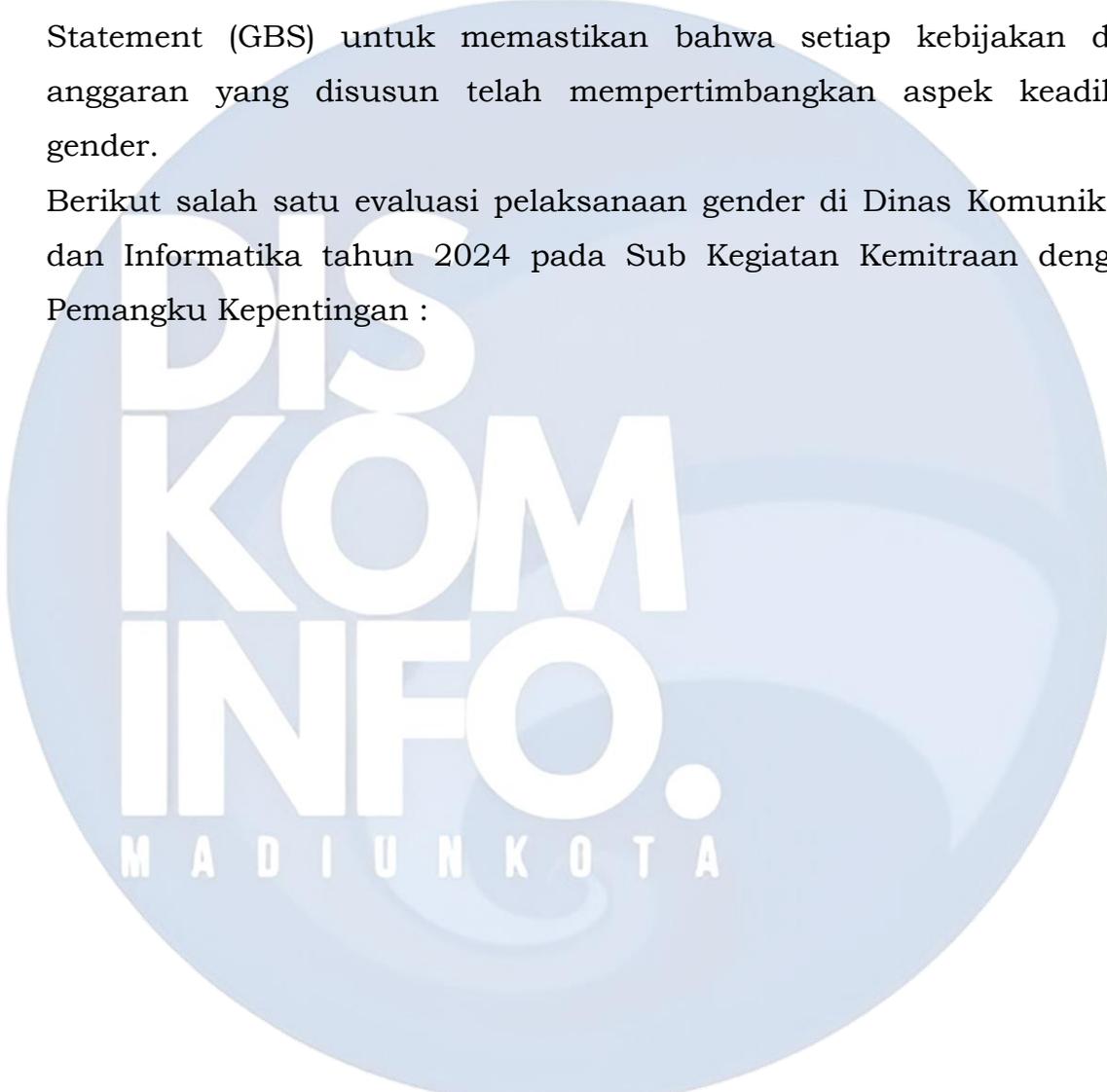
Pada tahun 2024, pelaksanaan gender di Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan beberapa capaian penting. Dari sisi kelembagaan, keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural dan fungsional semakin meningkat, menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Selain itu, program peningkatan kapasitas pegawai juga telah mengakomodasi pelatihan yang berperspektif gender, guna memastikan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang lebih baik terkait isu gender dalam pelayanan publik.

Dalam aspek pelayanan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan berbagai inovasi digital yang ramah gender. Salah satu contohnya adalah penyediaan layanan informasi yang inklusif, termasuk aksesibilitas bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Diskominfo juga terus mendorong partisipasi perempuan dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), melalui program literasi digital dan pelatihan keterampilan digital bagi perempuan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, penggunaan bahasa yang sensitif gender dalam penyampaian informasi publik menjadi perhatian utama. Materi komunikasi yang diproduksi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mengedepankan prinsip inklusivitas, sehingga tidak mengandung stereotip gender dan dapat diakses oleh semua kalangan.

Evaluasi pelaksanaan gender di Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk monitoring dan penilaian berbasis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang disusun telah mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Berikut salah satu evaluasi pelaksanaan gender di Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 pada Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan :



DIS
KOM
INFO.
MADIUNKOTA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base Line)	Indikator Gender
<p>Kebijakan : Meningkatkan pembinaan informasi kinerja pelayanan pemerintah Daerah yang tersebar luas ke masyarakat</p> <p>Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</p> <p>Tujuan : Meningkatnya Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah</p> <p>Sasaran : Kelompok Informasi Masyarakat di tiap kelurahan</p>	<p>Jumlah Kelurahan di Kota Madiun 27 Kelurahan</p> <p>Jumlah anggota KIM di Kota Madiun ada 27 KIM dengan jumlah anggota 276 orang dengan rincian jumlah laki-laki 83 orang dan jumlah perempuan sebanyak 193 orang</p>	<p>Akses : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Perempuan lebih tinggi</p> <p>Partisipasi : Tingkat Partisipasi dalam keanggotaan KIM, perempuan lebih tinggi</p> <p>Kontrol : Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan KIM, perempuan lebih mendominasi</p> <p>Manfaat : Penerima manfaat dari adanya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ini lebih banyak dari penduduk perempuan</p>	<p>Belum adanya ketentuan tentang proporsi anggota KIM laki-laki dan perempuan</p>	<p>Partisipasi laki-laki terkendala ijin dari tempat bekerja</p> <p>Ada anggota KIM yang merangkap menjadi anggota PKK</p>	<p>Meningkatnya Diseminasi informasi dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan responsive gender</p>	<p>Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat</p> <p>Output : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebanyak 27 Kelompok</p>	<p>Kegiatan Pemberdayaan KIM dalam satu tahun jumlah anggota 1 orang ketua KIM (laki-laki) dan 276 orang dengan rincian jumlah laki-laki 83 orang dan jumlah perempuan sebanyak 193 orang</p>	<p>Kegiatan Pemberdayaan KIM di 27 Kelurahan dalam setahun dengan harapan tingkat partisipasi kegiatan anggota KIM perempuan dan laki-laki adalah seimbang minimal perbandingan 60 : 40</p>

Tabel 3.26

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	
TAHUN ANGGARAN	2024	
PROGRAM/KEGIATAN/TUJUAN	Program :	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
	Kegiatan :	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
	Sub Kegiatan :	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	
	Tujuan :	
	Meningkatnya Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	
KODE PROGRAM	1.11.1.11.01.16	
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan :</p> <p>Jumlah Kelurahan di Kota Madiun 27 Kelurahan</p> <p>Jumlah anggota KIM di Kota Madiun ada 27 KIM dengan jumlah anggota 276 orang dengan rincian jumlah laki-laki 83 orang dan jumlah perempuan sebanyak 193 orang</p> <p>Isu Gender dan Faktor Kesenjangan :</p> <p>Akses : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Perempuan lebih tinggi</p> <p>Partisipasi : Tingkat Partisipasi dalam keanggotaan KIM, perempuan lebih tinggi</p> <p>Kontrol : Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan KIM, perempuan lebih mendominasi</p> <p>Manfaat : Penerima manfaat dari Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat lebih banyak dirasakan oleh Perempuan</p> <p>Penyebab Kesenjangan Internal : Belum adanya ketentuan tentang proporsi anggota KIM laki-laki dan perempuan</p> <p>Penyebab Kesenjangan Eksternal : Partisipasi laki-laki terkendala ijin dari tempat bekerja, Ada anggota KIM yang merangkap menjadi anggota PKK</p>	
CAPAIAN PROGRAM	<p>Tolak Ukur : Meningkatnya Diseminasi informasi dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan responsive gender</p> <p>Indikator Kinerja : Kegiatan Pemberdayaan KIM di 27 Kelurahan dalam satu tahun dengan harapan tingkat partisipasi kegiatan anggota KIM perempuan dan laki-laki adalah seimbang minimal perbandingan 60 : 40</p>	
JUMLAH ANGGARAN	Rp 135.415.219,00	
RENCANA AKSI	Masukan	Rp 135.415.219,00
	Kegiatan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	Keluaran	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	Hasil	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah

Tabel 3.27

Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement)

3.4 Inovasi Perangkat Daerah.

Sampai dengan tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah melaksanakan berbagai inovasi, diantaranya :

- a. Profit M-Tech (Program Wifi Gratis untuk Madiun Genggam Teknologi), Program wifi gratis untuk masyarakat, yang bisa juga dimanfaatkan untuk IoT (Internet of Things);
- b. Awak Sigap, Layanan WA terpadu untuk pelayanan dan pengaduan;
- c. Madiun Siaga 112, Layanan kegawatdaruratan;
- d. Kelas Sahabat, program siaran Kelas sahabat pada LPPL Radio Suara Madiun/ merupakan inovasi informasi edukatif dan literasi digital untuk mendukung proses belajar mengajar SD/SMP serta pemberdayaan masyarakat/ dengan memanfaatkan aplikasi berbasis *video conference*;
- e. Jebol Kiper, program pemberdayaan masyarakat, KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), Tim Penggerak PKK, dan Organisasi Sosial Masyarakat lainnya ikut terlibat sebagai Pendekar Informasi Bijak untuk menangkal berita-berita Hoax serta mensosialisasikan kanal pengaduan pelayanan informasi, SP4N-LAPOR!.
- f. Transformasi Jebol Kiper : PPID Goes to School
"PPID Goes to School" adalah program yang bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman siswa tentang keterbukaan informasi publik serta peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Program ini biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah, khususnya Dinas Kominfo, untuk memberikan edukasi mengenai hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel.
- g. MBANGUN SWARGA (Madiun Membangun, Sejahtera Bersama Warga)
Layanan Mbangun Swarga pada dasarnya adalah mengintegrasikan data penerima layanan bantuan dan penerima manfaat/layanan dari Pemerintah Kota Madiun. Dengan aplikasi ini, bisa didapatkan data yang dibutuhkan secara keseluruhan. Misalnya jumlah penduduk yang menerima bantuan sosial DTKS, bantuan Siaga Kita yang anaknya menerima beasiswa mahasiswa

(Be-Smart) dari Pemkot, atau data penerima layanan antrian RSUD yang juga menjadi pencari kerja (Sicaker), dan data – data yang lain sesuai yang dibutuhkan.

h. MANEKIN (Manajemen Kinerja Kota Madiun)

MANEKIN (Manajemen Kinerja Kota Madiun) adalah sistem yang digunakan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi kinerja aparatur serta efektivitas program pemerintahan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

i. Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SIOPA OMA)

Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SIOPA OMA) adalah platform digital yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar di Kota Madiun. Sistem ini berfungsi untuk memantau, mengelola, dan mendistribusikan informasi terkait operasi pasar, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebesar Rp. 28.586.658.935,00. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja operasi sebesar dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja operasi dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Realisasi belanja APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 7.948.661.563	Rp. 7.560.326.934	95,11%
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 3.421.850.097	Rp. 3.408.476.409	99,61%
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 16.874.395.275	Rp. 16.841.637.293	99,81%
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 100.000.000	Rp. 98.591.315	98,59%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 241.752.000	Rp. 234.918.999	97,17%
J u m l a h		Rp 28.586.658.935	Rp 28.143.950.950	98,19%

Tabel 3.28
Realisasi anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28.586.658.935 untuk berbagai program strategis. Dari total anggaran tersebut, realisasi mencapai Rp 28.143.950.950, dengan rata-rata capaian sebesar 98,19%.

Adapun rincian realisasi anggaran untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 7.948.661.563, dengan realisasi mencapai Rp 7.560.326.934, atau sekitar 95,11%.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Anggaran sebesar Rp 3.421.850.097 telah terealisasi sebesar Rp 3.408.476.409, dengan tingkat capaian 99,61%.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Dari anggaran sebesar Rp 16.874.395.275, telah terealisasi Rp 16.841.637.293, dengan tingkat capaian 99,81%.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000, dengan realisasi Rp 98.591.315, atau mencapai 98,59%.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Dengan anggaran Rp 241.752.000, realisasi yang dicapai adalah Rp 234.918.999, dengan capaian 97,17%.

Secara keseluruhan, capaian anggaran tahun 2024 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, dengan realisasi hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik serta optimalisasi program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

**DIS
KOM
INFO.**
M A D I U N K O T A

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan 5 (lima) indikator. Dari capaian 5 (lima) indikator, semua indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sudah tercapai di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil realisasi anggaran tahun 2024, organisasi telah mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan program, dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 98,19%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program utama, seperti pengelolaan informasi, aplikasi informatika, serta pengamanan data dan statistik sektoral.

Langkah yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Optimalisasi Digitalisasi – Meningkatkan efisiensi melalui integrasi teknologi informasi.
2. Evaluasi dan Penyempurnaan Program – Melakukan analisis mendalam terhadap capaian dan kendala program untuk perbaikan lebih lanjut.
3. Peningkatan Kapasitas SDM – Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada pegawai agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan.

4. Penguatan Kolaborasi – Memperluas kerja sama dengan berbagai pihak guna mempercepat pencapaian target strategis.
5. Transparansi dan Akuntabilitas – Memastikan sistem monitoring dan evaluasi berjalan optimal untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan organisasi dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.



A. POHON KINERJA

Pohon Kinerja OPD	
Clone	
Nama OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 1	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik
Indikator	Indeks Domain Layanan SPBE
Indikator	Indeks Domain Manajemen SPBE
Tujuan 2	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik
Indikator	Indeks Domain Layanan SPBE
Indikator	Indeks Domain Manajemen SPBE
Tujuan 3	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik
Indikator	Indeks Domain Layanan SPBE
Indikator	Indeks Domain Manajemen SPBE
Tahun	2024
Tampilkan Semua + Strategi Baru	

Strategic

Cetak Pohon Kinerja

Strategic	Meningkatnya keterbukaan informasi publik
-----------	---

Detail

Crosscutting
Edit
Hapus

Pindah
Tampilkan

Strategic

Cetak Pohon Kinerja

Strategic	Meningkatnya kualitas penerapan e-government
-----------	--

Detail

Crosscutting
Edit
Hapus

Pindah
Tampilkan

Strategic

Cetak Pohon Kinerja

Strategic	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral
-----------	---

Detail

Crosscutting
Edit
Hapus

Pindah
Tampilkan

Strategic

Cetak Pohon Kinerja

Strategic	Meningkatnya Keamanan Infomasi
-----------	--------------------------------

Detail

Crosscutting
Edit
Hapus

Pindah
Tampilkan

Strategic

Cetak Pohon Kinerja

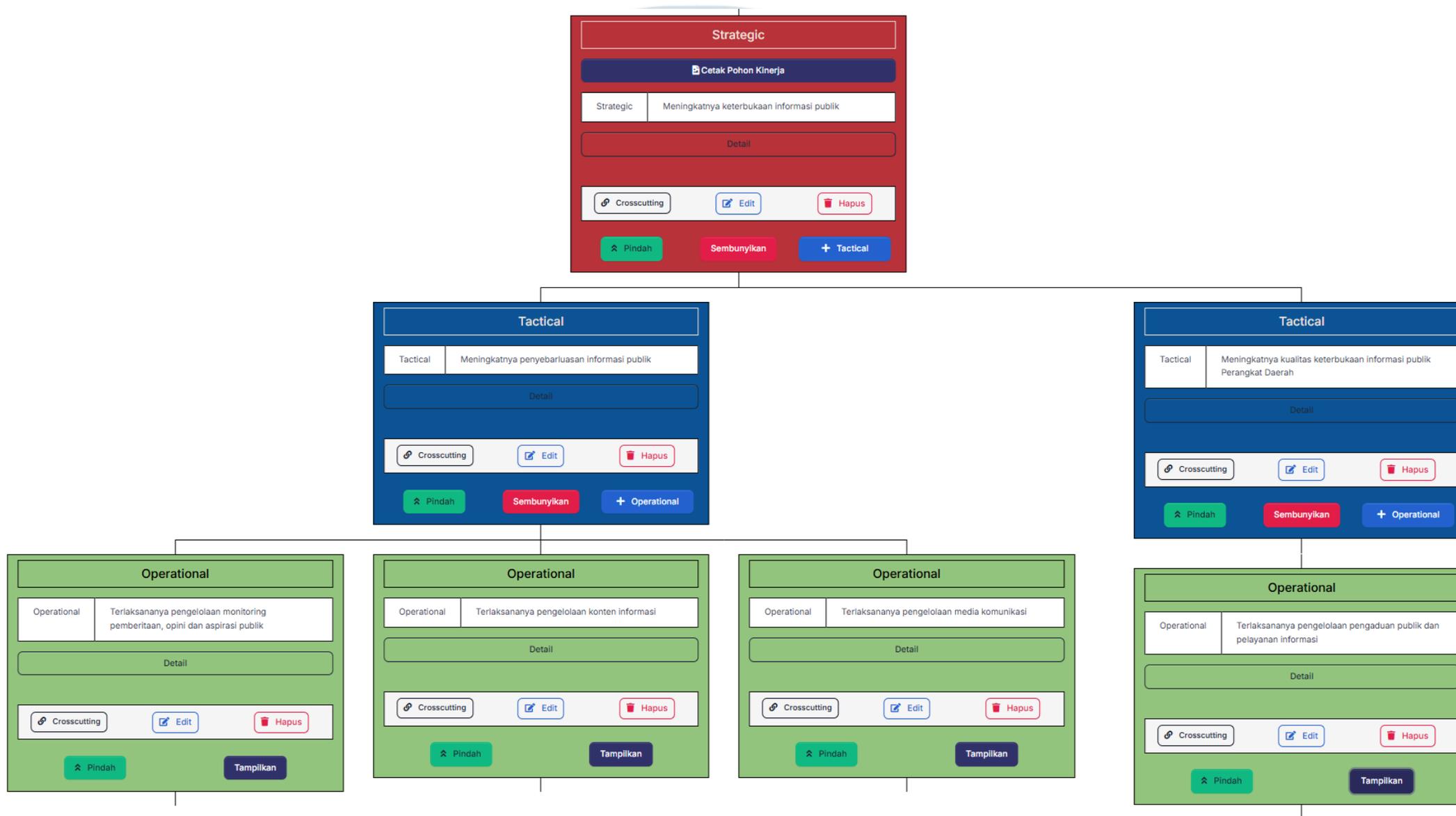
Strategic	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
-----------	--

Detail

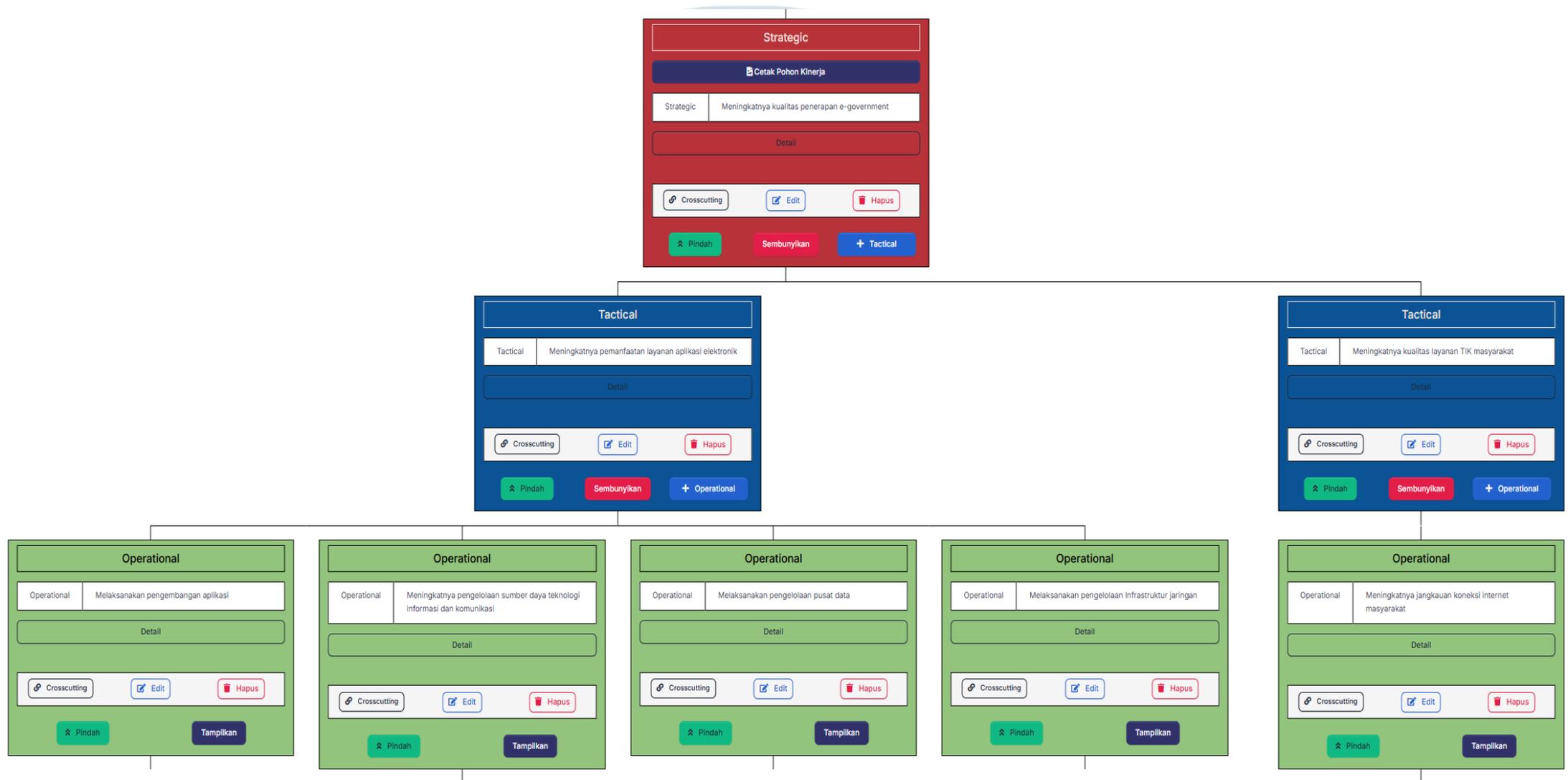
Crosscutting
Edit
Hapus

Pindah
Tampilkan

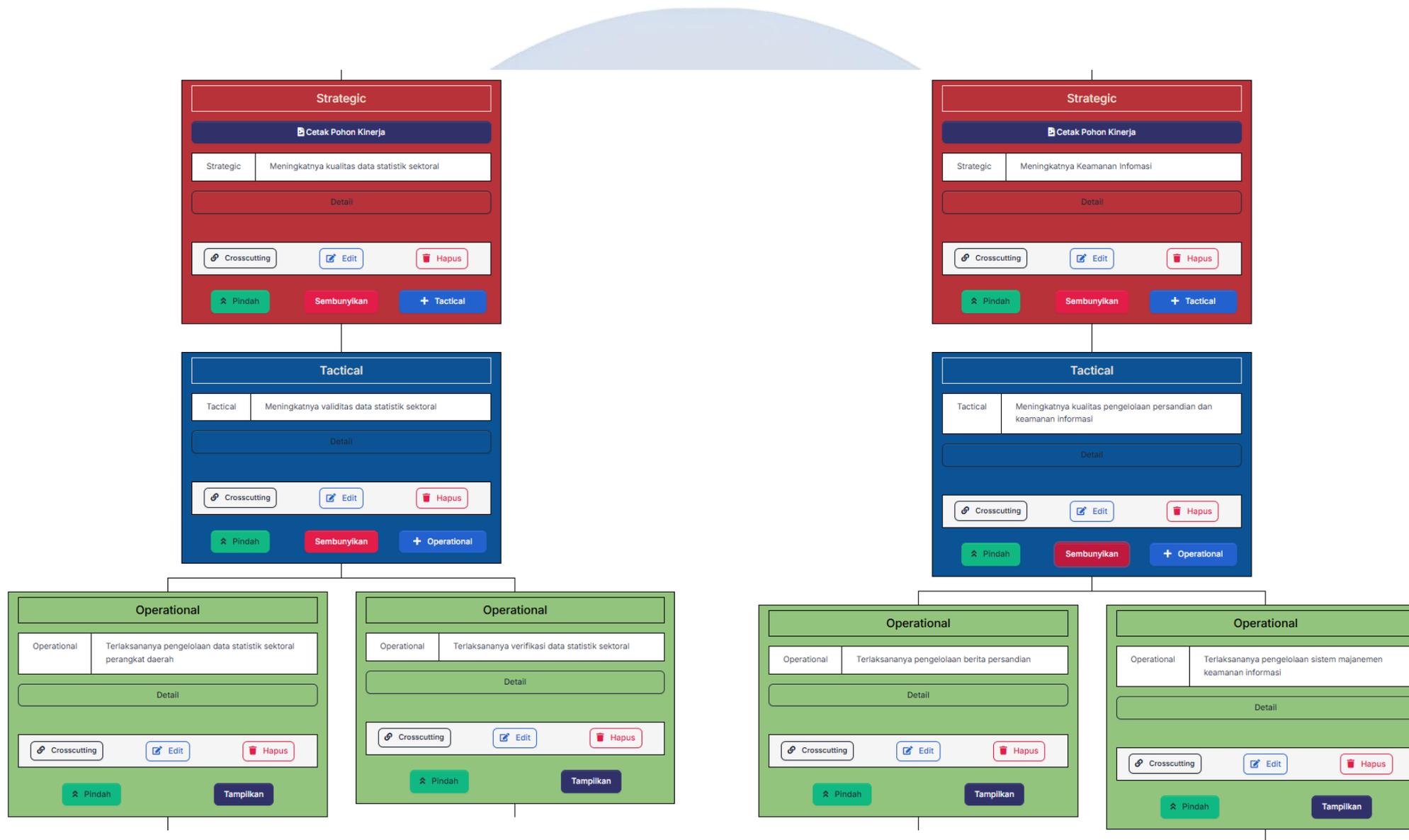
A.1 Pohon Kinerja : Meningkatnya keterbukaan informasi publik



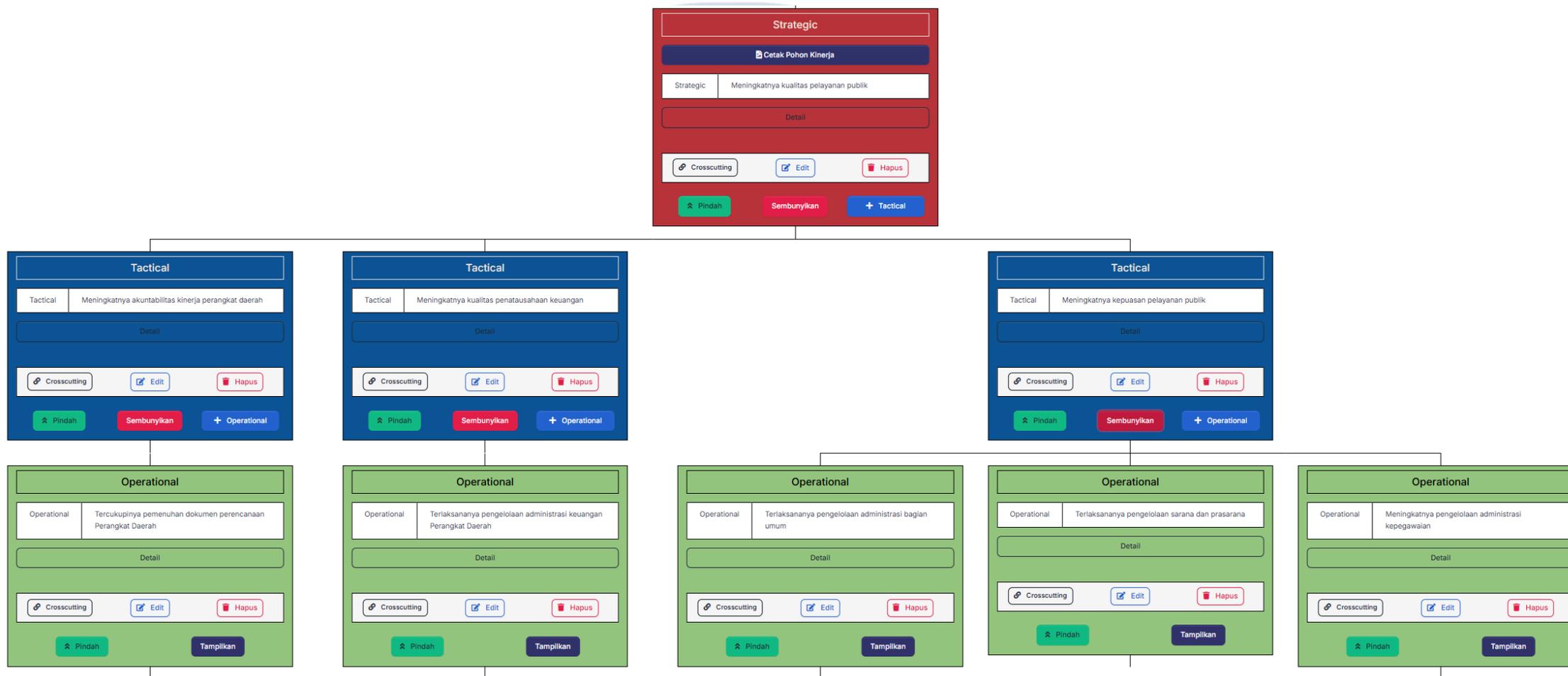
A.2 Pohon Kinerja : Meningkatnya kualitas penerapan e-government



A.3 Pohon Kinerja : Meningkatnya kualitas data statistik sektoral dan Meningkatnya Keamanan Infomasi



A.3 Pohon Kinerja : Meningkatnya kualitas pelayanan publik



B. MATRIK RENSTRA

Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2 16	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP	A	7.830.965.000	A	6.946.339.000	A	8.050.000.000	A	8.305.000.000		31.132.304.000
	2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	460.000.000
	2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	115.000.000	10 dokumen	115.000.000					20 dokumen	230.000.000
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10 laporan	115.000.000	10 laporan	115.000.000	20 laporan	230.000.000
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.759.400.000	100%	3.783.741.000	100%	4.000.000.000	100%	4.200.000.000	100%	15.743.141.000
	2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	3.759.400.000	100%	3.783.741.000	100%				100%	7.543.141.000
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37 orang	4.000.000.000	37 orang	4.200.000.000	37 orang	8.200.000.000
	2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian		1.076.826.000	100%	999.400.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.076.226.000

Laporan Kinerja Tahun 2024

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 paket	1.076.826.000	1 paket	999.400.000					1 paket	2.076.226.000
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					50 orang	1.000.000.000	50 orang	1.000.000.000	100 orang	2.000.000.000
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	91.447.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	816.447.000
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	91.447.000	100%	200.000.000					100%	291.447.000
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25 laporan	250.000.000	25 laporan	275.000.000	50 laporan	525.000.000
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%		100%		100%	425.000.000	100%	325.000.000	100%	750.000.000
	2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 unit	25.000.000			1 unit	25.000.000
	2	16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					20 unit	400.000.000	12 unit	325.000.000	32 unit	725.000.000
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	2.328.292.000	100%	1.228.338.000	100%	1.600.000.000	100%	1.650.000.000	100%	6.806.630.000
	2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2.328.292.000	100%	1.228.338.000					100%	3.556.630.000
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 laporan	1.600.000.000	1 laporan	1.650.000.000	2 laporan	3.250.000.000
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	460.000.000	100%	619.860.000	100%	660.000.000	100%	740.000.000	100%	2.479.860.000

Laporan Kinerja Tahun 2024

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	165.000.000	100%	150.500.000					100%	315.500.000
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					31 unit	160.000.000	31 unit	165.000.000	31 unit	325.000.000
	2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	132.500.000	100%	132.500.000					100%	265.000.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 unit	150.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	350.000.000
	2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	162.500.000	100%	336.860.000					100%	499.360.000
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					50 unit	350.000.000	50 unit	375.000.000	100 unit	725.000.000
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik			77%	4.788.605.000						
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	75%	4.619.278.000			80%	5.500.000.000	82%	5.900.000.000	82%	20.807.883.000
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	4.619.278.000	100%	4.788.605.000	100%	5.500.000.000	100%	5.900.000.000	100%	20.807.883.000
	2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	1200 Informasi	2.589.955.000	1200 Informasi	2.388.755.000					2400 informasi	4.978.710.000
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik					12 dokumen	2.600.000.000	12 dokumen	2.750.000.000	24 dokumen	5.350.000.000
	2	16	02	2.01	04	Pegelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	5 Media	1.416.495.000	5 Media	1.438.697.000					5 media	2.855.192.000

Laporan Kinerja Tahun 2024

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					12 dokumen	1.600.000.000	12 dokumen	1.700.000.000	24 dokumen	3.300.000.000
	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	151.290.000	100%	249.850.000					100%	401.140.000
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					12 dokumen	300.000.000	12 dokumen	400.000.000	24 dokumen	700.000.000
	2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif			27 kelompok	361.303.000					27 Kelompok	361.303.000
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					12 dokumen	400.000.000	12 dokumen	400.000.000	24 dokumen	800.000.000
	2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	27 Kelompok	201.460.000								201.460.000
							Jumlah Kegiatan			1 paket	100.000.000						100.000.000
							Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya					26 orang	200.000.000	30 orang	200.000.000	30 orang	400.000.000
	2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	6 Tema Informasi	260.078.000	7 Tema Informasi	350.000.000					13 tema informasi	610.078.000
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					12 dokumen	400.000.000	12 dokumen	450.000.000	24 dokumen	850.000.000
Terlaksananya penerapan e-government pada pelayanan publik yang terpadu dan menjangkau masyarakat	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			100%	10.587.483.000						

Laporan Kinerja Tahun 2024

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas penerapan e-government						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	9.760.450.600			100%	11.510.000.000	100%	11.860.000.000	100%	43.717.933.600
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	5.718.547.600	100%	5.100.000.000	100%	5.400.000.000	100%	5.600.000.000	100%	21.818.547.600
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	238 Domain	26.800.000	238 Domain	100.000.000					238 Domain	126.800.000
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	2 dokumen	200.000.000
	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	1550 Titik	5.691.747.600	1750 titik	5.000.000.000					1750 titik	10.691.747.600
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					82 unit	5.300.000.000	82 unit	5.500.000.000	82 unit	10.800.000.000
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	4.041.903.000	100%	5.487.483.000	100%	6.110.000.000	100%	6.260.000.000		21.899.386.000
	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	1 Paket	2.300.200.000	1 Paket	3.978.000.000					1 paket	6.278.200.000
							Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1 dokumen	4.000.000.000	1 dokumen	4.000.000.000	2 dokumen	8.000.000.000

Laporan Kinerja Tahun 2024

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	180 Titik	455.000.000	180 Titik	400.000.000				180 Titik	855.000.000
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	2 dokumen	1.000.000.000
	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	7 Aplikasi	460.000.000	7 Aplikasi	460.000.000				7 aplikasi	920.000.000
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 unit	460.000.000	3 unit	460.000.000	6 unit	920.000.000
	2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	1 paket	306.822.960	1 paket	302.558.000				1 paket	609.380.960
							Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 layanan	350.000.000	2 layanan	400.000.000	2 layanan	750.000.000
	2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	100%	404.605.000	100%	100.000.000				100%	504.605.000
							Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	2 dokumen	900.000.000
	2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	1 Unit	115.275.040	1 Unit	60.925.000				1 unit	176.200.040
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	350.000.000
	2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK			4 komunitas	186.000.000				4 komunitas	186.000.000

Laporan Kinerja Tahun 2024

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	2 dokumen	450.000.000
	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
Tersedianya data statistik sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	313.278.000	1 dokumen	499.250.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	1.912.528.000
Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	313.278.000	1 survey	499.250.000	1 survey	550.000.000	1 survey	550.000.000	1 survey	1.912.528.000
	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	1 Dokumen	313.278.000	1 Dokumen	294.850.000				2 dokumen	608.128.000
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 dokumen	600.000.000
	2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah kegiatan			1 paket	55.000.000				1 paket	55.000.000
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					3 orang	100.000.000	3 orang	100.000.000	3 orang	200.000.000
	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata			1 dokumen	149.400.000				1 dokumen	149.400.000
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun					1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	2 dokumen	300.000.000
	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											

Laporan Kinerja Tahun 2024

(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	195.502.695	100%	350.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000		1.645.502.695
Meningkatnya Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	195.502.695	2 JKS	350.000.000	2 JKS	500.000.000	2 JKS	600.000.000		1.645.502.695
	2	20	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi			34 OPD	50.000.000					34 OPD	50.000.000
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					1 laporan	200.000.000	1 laporan	300.000.000	2 laporan	500.000.000
	2	20	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah berita sandi yang diamankan	800 berita	195.502.695	800 berita	300.000.000					1600 berita	495.502.695
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					34 Perangkat at Daerah	300.000.000	34 Perangkat Daerah	300.000.000	34 Perangkat at Daerah	600.000.000

Mengetahui,
**KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA MADIUN**

(Signature)
NOOR AFLAH, S.Kom
 Pembina
 NIP 197609072003121007

C. PERJANJIAN KINERJA 2024



WALIKOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOOR AFLAH ,S.Kom

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.

Jabatan : PJ WALIKOTA MADIUN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.

Madiun, 06 September 2024
Pihak Pertama,

NOOR AFLAH, S.Kom
NIP. 197609072003121007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	93 Nilai
2.	Meningkatnya Keamanan Infomasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	555 Nilai
3.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2.18 Nilai
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4.65 Nilai
5.	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	68.5 %

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.948.661.563
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.421.850.097
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	16.874.395.275
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100.000.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	241.752.000
	Jumlah	Rp. 28.586.658.935

PJ WALIKOTA MADIUN



EDDY SUPRIYASTO, S.STP., M.PSDM.

Madiun, 06 September 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



NOOR AFLAH, S.Kom
NIP 197609072003121007

D. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	93 Nilai	97.42 Nilai	104.75%
2	Meningkatnya keamanan Informasi	Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	555 Nilai	625 Nilai	112,61%
3	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat Kematangan statistik sektoral	2.18 Nilai	2.18 Nilai	100%
4	Meingkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.65 Nilai	4.83 Nilai	103.87%
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yang sudah terintegasi	68.5 %	71.79%	104.80%

Keterangan :

1. Kolom 1 : Penomoran;
2. Kolom 2 : Diisi dengan kebijakan merujuk pada Sasaran yang tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah (Eselon 2);
3. Kolom 3 : Diisi dengan indikator kinerja sasaran;
4. Kolom 4 : Diisi dengan target yang ingin dicapai;
5. Kolom 5 : Diisi dengan realisasi capaian target.

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun



NOOR AFLAH, S.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19760907 200312 1 007

E. PENGHARGAAN

- 1) Penghargaan Kabupaten/Kota (Indonesia Barat) Terbaik (Peringkat I) Kontribusi Konten Audio Visual untuk Dinas Kominfo Kota Madiun dalam Anugerah Media Center (AMC) 2024
- 2) Penghargaan Digital Government Award 2024 dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 3) Penghargaan Kepada PPID Dinas Kominfo Kota Madiun sebagai 10 Instansi Terbaik Program Pariwara Antikorupsi 2024
- 4) Penghargaan Top 5 Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Pelayanan Publik 2024 untuk Inovasi Profit M-Tech Dinas Kominfo Kota Madiun sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Berkelanjutan
- 5) Penghargaan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Terbaik Ketiga Tahun 2024 dengan nilai 97,42
- 6) Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top Digital Implementation 2024 Level 5 Stars
- 7) Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top CIO Digital Implementation 2024 untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun, Noor Aflah
- 8) Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top Leader on Digital Implementation 2024 Kepada Pj. Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto
- 9) Penghargaan Implementasi smartcity tahap II Tahun 2024 Peringkat ke 3 Nasional Kategori Reguler dengan Nilai 3,80
- 10) Penghargaan Hasil Evaluasi SPBE Peringkat ke 4 Nasional dan Peringkat ke 3 Provinsi Jawa Timur dengan nilai 4,57